BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN

Bab V ini menunjukkan tentang simpulan, implikasi, dan keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan. Bab ini juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya sebagai pengembangan lanjutan dari penelitian tentang kepatuhan laporan keuangan BMT ini.

A. Simpulan

Laporan keuangan yang dibuat *Baitul Mal Wa Tamwil* terjadi banyak kerancuan. Pencatatan laporan keuangan BMT masih banyak ditemukan ketidak sesuaian dengan standar akuntansi keuangan. Dilihat dari segi kelengkapan laporan keuangan, jenis laporan keuangan yang dibuat hanya bersifat mewakili saja atau membuat yang dianggap penting saja. Laporan keuangan yang di buat hanya yang bersifat umum. Berdasarkan PSAK No. 101 tentang laporan keuangan syari'ah, seharusnya BMT membuat tujuh jenis laporan keuangan. Sedangkan kalau berdasarkan PSAK No. 27 laporan keuangan yang dibuat harus terdiri lima jenis laporan keuangan.

Sedangkan dari sisi format laporan keuangan, terdapat perbedaan antara BMT yang satu dengan yang lainnya. BMT Beringharjo dan BMT Bina Ummah mengacu pada PSAK No. 101 tentang laporan keuangan entitas Syari'ah. Meskipun BMT tersebut berbadan hukum koperasi, tapi pencatatan dan penyajian akuntansinya menggunakan PSAK No.101 dilihat dari persamaan akuntansinya. Meskipun dari segi persamaan sesuai PSAK No. 101, akun yang ada didalam laporan keuangan tersebut masih terdapat akun

yang menunjukkan laporan keuangan koperasi. Sedangkan BMT Bringharjo dan Bina Ummah, BMT Agawe Makmur dan BMT GEMI dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya lebih mengacu pada PSAK No. 27 tentang koperasi bila dilihat dari persamaannya. Modal yang didapat koperasi hanya berasal dari anggotanya yang berupa simpanan-simpanan. Tidak adanya akun dana syirkah temporer menunjukkan bahwa BMT Agawe Makmur dan BMT GEMI mengacu pada PSAK No.27. Meskipun mengacu PSAK No. 27 akun yang ada di laporan keuangan BMT tersebut masih kombinasi antara laporan keuangan koperasi dan laporan keuangan syari'ah.

Menurut pakar syari'ah, perbedaan kelengkapan maupun format laporan keuangan BMT disebabkan tidak adanya aturan yang memikat, regulasi BMT yang masih lemah dan kurangnya pengawasan dari dinas koperasi. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan BMT.

B. Implikasi

Berbagai temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh BMT agar lebih dapat meningkatkan kepatuhan laporan keuangan BMT terhadap PSAK.

1. Minimnya Kepercayaan masyarakat

Laporan keuangan memberikan informasi yang dapat mempengaruhi penggunanya. Masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan dengan laporan keuangan yang disajikan dengan relevan dan andal. Laporan keuangan BMT yang masih banyak kerancuan dapat memicu berkurangnya minat atau kepercayaan masyarakat.

2. Perlunya Peningkatan Pengawasan dari Dinas Kopearasi.

BMT merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi tetapi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syari'ah. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan dari BMT yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada BMT yang mengacu pada PSAK No. 27 tetapi ada juga yang mengacu PSAK No. 101. Kurangnya pengawasan Dinas Koperasi membuat pencatatan laporan keuangan BMT berbedabeda. Seharusnya Dinas Koperasi melakukan *monitoring* yang lebih terhadap BMT agar lebih terstandarisasi.

3. Perlunya aturan yang Ketat

Selama ini belum aturan yang ketat terkait dengan laporan keuangan BMT. BMT diberi kebebasan terkait dengan pencatatan dan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat BMT merupakan laporan keuangan yang dianggap penting saja. Hal inilah yang menjadi ketidakserasian kelengkapan laporan keuangan BMT. Harus ada aturan yang ketat, supaya laporan keuangan BMT lebih terstandarisasi.

C. Keterbatasan dan Saran Peneliti

1. Keterbatasan Penelitian

a. Objek

Ada banyak BMT yang tersebar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan peneliti hanya memilih 4 BMT. Alasan peneliti yaitu, karena sulitnya dalam permintaan data yang berupa laporan

keuangan. Selain itu 4 BMT tersebut merupakan rekomendasi dari PBMT pusat yang ada di Jakarta.

b. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pakar dan pihak BMT. Pakar dalam penelitian ini adalah dosen yang ada di Yogyakarta yang meliputi 3 perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara banyak ke Pakar karena alasan belum banyak yang paham mengenai topik penelitian.

c. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, ini mengandung konsekuensi rendahnya validitas dan nilai generalisasi temuan. Karena penelitian belum melakukan proses pengujian (*examination*). Namun, peneliti telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk mendiskripsikan apa yang telah diperoleh selama penelitian dan tidak ada hal yang ditambahi maupun dikurangi.

2. Saran Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya bisa lebih mengembangkan penelitian ini agar lebih baik, misal dengan studi empiris di provinsi yang berbeda atau seluruh BMT yang ada di Indonesia. Menambah informan atau pihak yang dianggap penting untuk dijadikan narasumber.